

ANALISIS KRISIS DEMOKRASI: STUDI KASUS MALPRAKTEK PEMILU DI BELARUS, MYANMAR DAN UKRAINA PADA TAHUN 2019 DAN 2020

DEMOCRATIC CRISIS ANALYSIS: CASE STUDY OF ELECTION MALPRACTICES IN BELARUS, MYANMAR AND UKRAINE IN 2019 AND 2020

Difa Ghassani¹⁾, Doni Hendrik²⁾

^{1,2} Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas

dfghssni@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam praktik demokrasi di Belarus, Myanmar, dan Ukraina melalui studi kasus pemilu yang berlangsung pada tahun 2019 dan 2020. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama dalam pemilu di ketiga negara, termasuk manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih, kekerasan terhadap oposisi, serta ketidaksetaraan dalam akses media. Metode analisis konten dan tematik digunakan untuk menggali pola-pola yang muncul dari pelaksanaan pemilu di masing-masing negara dan perbandingan antara satu negara dengan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketiga negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga integritas pemilu dan kebebasan media, respons internasional terhadap permasalahan ini bervariasi, dengan Belarus dan Myanmar mendapatkan kecaman internasional, sementara Ukraina meskipun mendapatkan kritik terhadap manipulasi media, tetap dipandang lebih bebas dalam hal proses pemilu. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai dinamika demokrasi di negara-negara dengan latar belakang politik yang berbeda serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai pemilu yang adil dan bebas.

Kata Kunci: Pemilu, Demokrasi, Media, Manipulasi Suara, Kekerasan

ABSTRACT: This study aims to analyze the challenges in the practice of democracy in Belarus, Myanmar, and Ukraine through a case study of the elections held in 2019 and 2020. Using secondary data obtained from various reliable sources, the research identifies key issues in the elections of the three countries, including vote manipulation, voter intimidation, violence against the opposition, and media access inequality. Content and thematic analysis methods are used to uncover patterns emerging from the elections in each country and to compare them with one another. The results show that although all three countries face similar challenges in maintaining election integrity and media freedom, international responses vary, with Belarus and Myanmar receiving widespread condemnation, while Ukraine, despite criticism of media manipulation, is still regarded as more free in terms of the electoral process. This study provides important insights into the dynamics of democracy in countries with different political backgrounds and the challenges faced in achieving fair and free elections.

Keywords: Elections, Democracy, Media, Vote Manipulation

A. PENDAHULUAN

Malpraktik pemilu di seluruh dunia menunjukkan bahwa meskipun pemilu merupakan landasan utama bagi demokrasi modern, praktik buruk dalam penyelenggarannya tetap menjadi masalah serius yang mengancam integritas dan legitimasi proses politik. Pemilu yang bebas, adil, dan transparan adalah prinsip dasar yang diharapkan dapat memastikan bahwa suara rakyat dihitung dengan jujur, sehingga menciptakan pemerintahan yang sah dan akuntabel. Namun, di banyak negara, malpraktik pemilu tetap terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi suara, intimidasi pemilih, kecurangan dalam penghitungan suara, hingga penggunaan kekerasan oleh aparat negara. Malpraktik pemilu dapat terjadi di negara manapun, baik yang dianggap sebagai negara demokratis maupun yang baru saja bertransisi menuju demokrasi. Misalnya, di negara-negara dengan rezim

otoriter, pemilu sering kali digunakan sebagai sarana untuk memperkuat kekuasaan penguasa dengan cara yang tidak adil. Dalam banyak kasus, kekuatan politik yang berkuasa akan berusaha mengendalikan hasil pemilu melalui manipulasi suara, penipuan, atau intimidasi terhadap oposisi. Di sisi lain, negara-negara yang lebih demokratis juga tidak terlepas dari masalah ini, meskipun dalam skala yang lebih terbatas dan terkadang lebih terselubung.

Di berbagai negara, manipulasi suara adalah bentuk malpraktik yang paling umum ditemukan. Contoh yang paling sering terjadi adalah penggelembungan jumlah suara atau penghilangan suara yang sah. Misalnya, di Nigeria, dan Ukraina, terdapat klaim tentang pemalsuan atau manipulasi hasil suara di berbagai tempat pemungutan suara. Penggunaan surat suara palsu atau perubahan hasil penghitungan suara oleh pejabat pemilu sering kali terjadi di bawah tekanan dari partai penguasa, yang berusaha menjaga kontrol atas kekuasaan (Human Right Watch, 2019). Selain itu, intimidasi terhadap pemilih dan ketidaksetaraan akses terhadap proses pemilu juga menjadi masalah utama dalam banyak negara. Di beberapa tempat, kelompok-kelompok bersenjata atau partai politik yang berkuasa menggunakan taktik kekerasan untuk menakut-nakuti pemilih agar memilih kandidat atau partai tertentu. Di negara-negara seperti Venezuela dan Myanmar, tekanan terhadap oposisi dan ketidakadilan dalam pengawasan pemilu telah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang sah (Transparency International, 2021). Masalah lain yang kerap terjadi adalah media yang tidak adil dan kurangnya akses bagi oposisi untuk menyampaikan visi dan program mereka kepada publik. Di negara-negara yang media massa dikendalikan oleh pemerintah atau oligarki, berita yang diterima oleh pemilih seringkali sangat bias dan mendukung pihak yang berkuasa. Hal ini terbukti dalam kasus pemilu di negara-negara seperti Rusia dan Indonesia, di mana media sering kali menjadi alat untuk mendiskreditkan calon-calon oposisi dan memberi keuntungan yang tidak adil kepada calon-calon yang didukung oleh pemerintah (Freedom House, 2020).

Manipulasi pemilu juga bisa datang dalam bentuk pengaturan wilayah pemilihan atau "gerrymandering", di mana batas-batas daerah pemilihan digambar ulang dengan tujuan untuk memberi keuntungan politik kepada satu kelompok tertentu. Praktik ini banyak terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat dan India, di mana pembagian wilayah pemilu dilakukan dengan cara yang sangat strategis untuk memperkuat kekuatan partai dominan di wilayah-wilayah tertentu. Masalah keamanan dalam pemilu juga menjadi isu besar dalam banyak negara (The Carter Center 2018). Di negara-negara seperti Afghanistan, Irak, dan Yaman, di mana konflik bersenjata masih berlangsung, pemilu sering kali berlangsung dalam suasana yang sangat tidak aman. Kekerasan yang terjadi di sekitar tempat pemungutan suara dapat menghalangi pemilih untuk memberikan suara mereka atau bahkan mengarah pada pembatalan pemilu di beberapa daerah (United Nations, 2020). Dalam situasi seperti ini, malpraktik pemilu tidak hanya terbatas pada manipulasi hasil, tetapi juga pada pembatasan hak suara yang sah. Penyalahgunaan teknologi juga semakin menjadi perhatian dalam pemilu modern. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, pemilu kini rentan terhadap serangan siber dan manipulasi data. Misalnya, dalam Pemilu AS 2016, terdapat laporan yang mengindikasikan adanya campur tangan dari pihak luar melalui media sosial dan peretasan untuk mempengaruhi hasil pemilu. Keamanan siber yang lemah dan penggunaan algoritma media sosial untuk menyebarkan disinformasi atau propaganda telah menjadi bentuk baru dari malpraktik pemilu yang semakin sulit dideteksi (The Guardian, 2017).

Penyalahgunaan anggaran pemilu juga merupakan bentuk malpraktik yang terjadi di banyak negara. Sumber daya yang dialokasikan untuk pemilu sering kali diselewengkan oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk mendukung kemenangan mereka. Dalam beberapa kasus, dana untuk pemilu digunakan untuk membeli suara atau memberikan insentif kepada pemilih dalam bentuk barang atau uang. Hal ini merusak esensi dari pemilu yang harusnya bebas dari pengaruh luar dan berbasis pada keputusan politik yang rasional dari rakyat. Pentingnya reformasi dalam sistem pemilu global semakin jelas, karena malpraktik pemilu tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga dapat memicu ketegangan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih dalam. Dalam beberapa kasus, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu dapat memicu kekerasan, seperti yang terjadi di Kenya pada 2007 dan di Haiti pada 2015. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa pemilu di seluruh dunia dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi (Transparency International, 2022). Mengacu kepada latar belakang tersebut diatas, maka beberapa persoalan yang dijadikan rumusan masalah dalam kajian ini diantaranya : Pertama, bagaimana perbandingan

malpraktek pemilu di Negara Belarus, Myanmar dan Ukraina dan apa tantangan dan point utama terjadinya malpraktek pemilu di negara tersebut, selanjutnya tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan serta tantangan malpraktek pemilu di Negara Belarus, Myanmar dan Ukraina.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis tantangan dalam praktik demokrasi di Belarus, Myanmar, dan Ukraina pada pemilu 2020 dan 2019. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia secara publik, termasuk laporan organisasi internasional seperti PBB, Human Rights Watch, dan lembaga pengawas pemilu lainnya, serta artikel berita dari media internasional terkemuka seperti BBC, Reuters, dan The Guardian. Selain itu, data juga dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah dan laporan akademik yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis media, dengan fokus pada hasil-hasil pemilu, laporan pelanggaran, serta peran media dalam membentuk opini publik. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis konten dan tematik, dimana data yang dikumpulkan dikategorikan sesuai dengan tema-tema utama yang berkaitan dengan manipulasi suara, kekerasan terhadap oposisi, dan ketidaksetaraan akses terhadap informasi di media. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam setiap kasus dan melakukan perbandingan antara ketiga negara yang menjadi fokus penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Pemilu di Belarus, Myanmar, dan Ukraina

Pemilu adalah salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin yang sah dan menentukan arah politik suatu negara. Namun, budaya dalam penyelenggaraan pemilu di berbagai negara tidak selalu sama. Masing-masing negara memiliki karakteristik budaya politik yang mempengaruhi proses dan hasil pemilu. Dalam konteks ini, Belarus, Myanmar, dan Ukraina memiliki dinamika yang menarik, yang dapat dilihat dari perspektif budaya dan politik pemilu mereka. Dalam tulisan ini, akan dibahas budaya pemilu di ketiga negara ini, dengan rujukan dari sumber-sumber Indonesia.

1. Belarus: Pemilu yang Dikendalikan Pemerintah

Pemilu di Belarus, yang dipimpin oleh Presiden Alexander Lukashenko sejak 1994, dikenal dengan sistem yang sangat terkontrol oleh pemerintah. Budaya politik di negara ini sangat terpusat pada kekuasaan eksekutif yang kuat. Pemilu di Belarus sering kali dianggap tidak bebas dan tidak adil karena adanya pengawasan ketat terhadap partai oposisi dan media. Media yang ada di negara ini sebagian besar dikuasai oleh negara dan mendukung pemerintahan Lukashenko. Oposisi sering kali dihadapkan pada pembatasan akses ke media, serta pengawasan yang ketat. "Pemilu di Belarus cenderung memusatkan kekuasaan pada satu individu," seperti yang dikatakan oleh beberapa analis politik Indonesia yang mengamati proses politik di Belarus (Kompas, 2020). Pemilu di Belarus sering diwarnai dengan tuduhan kecurangan dan manipulasi. Dalam beberapa pemilu sebelumnya, termasuk pemilu presiden yang terakhir, hasil pemilu sering dipertanyakan oleh komunitas internasional. Proses pemilihan yang tidak transparan dan intimidasi terhadap calon oposisi menjadi bagian dari budaya pemilu di Belarus. Sumber-sumber media Indonesia seperti *Tempo* (2020) melaporkan bahwa banyak laporan tentang pemilu yang diselewengkan, dengan suara rakyat yang tidak dihitung dengan benar. Ketidakadilan yang terjadi dalam pemilu Belarus memperburuk integritas sistem politik di negara tersebut.

2. Myanmar: Pemilu dalam Ketegangan Militer dan Sipil

Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, mengalami transisi demokrasi yang penuh tantangan setelah dekade panjang di bawah pemerintahan militer. Budaya pemilu di Myanmar dipengaruhi oleh ketegangan antara pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk

Demokrasi (NLD) dan militer Myanmar yang memiliki kekuatan besar. Pemilu di Myanmar sering kali diwarnai oleh klaim kecurangan, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, dan pertentangan antara berbagai pihak politik. Pemilu 2020, yang merupakan pemilu kedua sejak transisi demokrasi dimulai pada 2010, menjadi contoh yang menarik. Meski pemilu berjalan relatif damai, ada banyak tuduhan manipulasi suara dan tekanan terhadap pihak oposisi (Republika, 2021). Salah satu isu utama dalam pemilu Myanmar adalah tuduhan kecurangan, yang sering datang dari pihak oposisi dan bahkan militer. Seperti yang dilaporkan oleh *The Jakarta Post* (2020), banyak klaim bahwa pemilu 2020 tidak sepenuhnya adil, dengan tuduhan ribuan surat suara yang dicetak secara ilegal dan pemilih yang sah tidak dapat memberikan suaranya. Selain itu, ada juga laporan bahwa media yang lebih pro-pemerintah sering kali menyebarkan informasi yang tidak akurat untuk mendukung partai yang berkuasa, yaitu NLD. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam akses media dan peranannya dalam budaya pemilu Myanmar.

Meskipun Myanmar telah beralih ke sistem semi-demokratis, militer masih memiliki kekuatan yang sangat besar dalam politik negara ini. Militer Myanmar, yang mendukung Partai Solidaritas dan Pembangunan Union (USDP), sering kali terlibat dalam intervensi politik, terutama jika ada Ancaman terhadap kekuasaan mereka. Ketegangan antara NLD dan USDP semakin meningkat menjelang pemilu 2020, dan akhirnya memuncak pada kudeta militer pada Februari 2021. Pemilu, meskipun dilaksanakan dengan aman, tidak bisa sepenuhnya bebas dari pengaruh militer. Banyak pengamat dari Indonesia, seperti yang disampaikan oleh *Republika* (2021), menganggap bahwa kontrol militer menjadi hambatan besar dalam penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil di Myanmar.

3. Ukraina: Pemilu dalam Konteks Geopolitik dan Perubahan Sosial

Ukraina, setelah mengalami Revolusi Oranye pada 2004 dan Revolusi Dignitas pada 2014, menjadi negara yang terus berjuang dalam membangun sistem demokrasi yang kokoh. Pemilu di Ukraina sangat dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dengan Rusia dan perpecahan internal antara pendukung pro-Barat dan pro-Rusia. Pemilu 2019 menjadi sangat penting karena untuk pertama kalinya Ukraina memilih seorang calon presiden yang bukan berasal dari kalangan politisi berpengalaman, yaitu Volodymyr Zelensky, seorang komedian yang tidak memiliki latar belakang politik. Dengan platform antikorupsi dan janji perubahan besar, Zelensky mampu menarik perhatian banyak pemilih, terutama generasi muda (CNN Indonesia, 2019). Budaya pemilu di Ukraina juga dipengaruhi oleh peran besar media dalam membentuk opini publik. Media Ukraina sangat terpolarisasi, dengan beberapa outlet media mendukung pemerintah yang ada, sementara yang lainnya mendukung calon oposisi. Proses pemilu di Ukraina sering kali diwarnai dengan manipulasi media, baik oleh pihak yang berkuasa maupun oleh aktor lain yang berkepentingan. Pemilu 2019 menunjukkan bagaimana oligarki dan kelompok-kelompok tertentu mengendalikan media untuk mendukung kandidat mereka, seperti yang dilaporkan oleh *Detik News* (2019). Di sisi lain, media sosial juga memainkan peran penting dalam kampanye, memberi kandidat kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan rakyat.

Budaya pemilu di Ukraina tidak bisa dipisahkan dari ketegangan geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Pemilu di Ukraina sering kali diliputi dengan pertentangan antara politik pro-Barat dan pro-Rusia, yang memengaruhi pilihan politik rakyat. Ketegangan ini semakin terasa pasca-referendum Crimea pada 2014 dan konflik yang berlangsung di Donbas. Pemilu Ukraina juga dipengaruhi oleh strategi politik luar negeri yang memprioritaskan hubungan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Namun, seperti yang dijelaskan dalam laporan *CNN Indonesia* (2019), meskipun ada kemajuan dalam pemilu, faktor-faktor eksternal ini tetap memainkan peran besar dalam budaya politik dan pemilu di Ukraina.

Malpraktek Pemilu di Negara Belarus, Myanmar dan Ukraina

1. Pemilu Belarus 2020 (Manipulasi Suara dan Kekerasan terhadap Protes)

Pemilu Presiden Belarus pada Agustus 2020 sangat kontroversial. Presiden Aleksandr Lukashenko yang telah berkuasa selama lebih dari dua dekade kembali mengklaim kemenangan dengan hasil yang sangat diragukan. Banyak laporan menunjukkan adanya manipulasi suara dan

kecurangan dalam proses pemilu, termasuk penutupan tempat pemungutan suara, penghilangan surat suara, dan pembatasan akses untuk pengamat internasional. Setelah hasil pemilu diumumkan, protes besar-besaran meletus di seluruh negara, dan pasukan keamanan menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstran. Laporan-laporan juga menunjukkan penangkapan massal terhadap aktivis oposisi dan pengkritik pemerintah. Pemilu Presiden Belarus 2020, yang diadakan pada 9 Agustus 2020, menjadi titik puncak ketegangan politik yang sudah berlangsung lama di negara itu. Pemilu tersebut mengarah pada kekerasan besar-besaran, tuduhan manipulasi suara, dan protes massal yang menentang pemerintahan Presiden Alexander Lukashenko, yang telah memerintah Belarus selama lebih dari 26 tahun. Berikut adalah pembahasan terkait manipulasi suara dan kekerasan yang terjadi selama protes:

A. Manipulasi Suara dalam Pemilu 2020

Sebelum dan setelah pemilu, ada banyak tuduhan bahwa pemilu tersebut dicurangi. Masyarakat internasional dan banyak pengamat menyebut hasil pemilu sebagai "tidak sah" karena dugaan adanya manipulasi suara. Lukashenko, yang mencalonkan diri untuk masa jabatan keenam, diumumkan memenangkan lebih dari 80% suara, yang dipandang sebagai angka yang tidak realistik, mengingat adanya ketidakpuasan yang luas terhadap pemerintahannya.

1. Manipulasi Proses Pemilu

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa proses pemilu itu sendiri dimanipulasi. Ini termasuk penghitungan suara yang tidak transparan, intimidasi terhadap pemilih dan calon oposisi, serta larangan terhadap calon-calon yang berseberangan dengan pemerintah, seperti Svetlana Tikhanovskaya, yang menjadi tokoh utama oposisi (Freedom House, 2020).

2. Pemantauan Pemilu yang Terbatas

Pengawasan internasional terhadap pemilu ini dibatasi, dan banyak organisasi internasional, termasuk Uni Eropa, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), dan berbagai kelompok pemantau lainnya, menyatakan bahwa pemilu itu tidak memenuhi standar internasional yang sah (Human Right Watch, 2020).

B. Protes Massal dan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa

1. Protes yang Luas

Setelah pengumuman hasil pemilu yang dianggap tidak sah, protes besar-besaran meletus di seluruh Belarus. Masyarakat menuntut Lukashenko mundur dan pemilu yang baru. Ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes hasil pemilu tersebut, dan ini berlangsung selama beberapa minggu setelah pemilu (Reuters, 2020).

2. Tindakan Repressive Pemerintah

Untuk merespons protes ini, pemerintah Belarus menggunakan kekerasan yang sangat besar. Pasukan keamanan, termasuk polisi dan pasukan khusus, terlibat dalam penangkapan massal, penyiksaan, dan pembubaran paksa demonstrasi dengan cara kekerasan (Amnesty International, 2020).

3. Kekerasan terhadap Demonstran:

Banyak pengunjuk rasa yang dipukuli, diperlakukan secara kasar, dan bahkan ada laporan mengenai kematian beberapa demonstran. Menurut organisasi hak asasi manusia, lebih dari 7.000 orang ditangkap dalam beberapa minggu setelah pemilu, dan banyak yang melaporkan adanya penyiksaan selama penahanan (BBC News, 2020).

4. Kekerasan terhadap Jurnalis

Beberapa jurnalis yang meliput protes juga menjadi sasaran kekerasan. Beberapa ditangkap, sementara yang lain mengalami perlakuan kasar oleh aparat keamanan (Committee To Protect Journalist, 2020).

5. Tanggapan Internasional

Protes dan kekerasan yang terjadi mendapat kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa negara Barat mengenakan sanksi terhadap pejabat Belarus yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan manipulasi pemilu.

C. Reaksi dari Oposisi dan Dunia Internasional

1. Svetlana Tikhanovskaya

Svetlana Tikhanovskaya, yang merupakan tokoh oposisi utama dan istri dari seorang blogger yang ditangkap, muncul sebagai simbol perlawanan terhadap Lukashenko. Setelah pemilu, dia terpaksa melarikan diri ke Lithuania karena ancaman terhadap keselamatannya, tetapi dia tetap

menjadi suara oposisi yang kuat dan menyerukan untuk diadakannya pemilu yang adil (The Guardian, 2020).

2. Sanksi Internasional

Uni Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap pemerintahan Lukashenko, dengan menargetkan pejabat-pejabat tinggi yang terlibat dalam penindasan protes dan manipulasi pemilu. Uni Eropa juga tidak mengakui hasil pemilu sebagai sah dan menyebutnya sebagai pemilu yang "tercemar" (EU External Action, 2020).

3. Ketidakpuasan Rakyat

Protes-protes yang terjadi pasca-pemilu menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap Lukashenko. Meskipun pemerintah berhasil menahan protes dengan kekerasan, ketegangan politik di Belarus terus berlangsung (Reuters, 2020).

D. Dampak Jangka Panjang

1. Krisis Politik

Setelah pemilu, situasi politik di Belarus tetap tidak stabil. Pemerintahan Lukashenko terus menghadapi tantangan dari dalam negeri, meskipun dia berhasil bertahan di kekuasaan dengan bantuan dari Rusia. Lukashenko berusaha mempertahankan kontrol dengan bantuan pasukan keamanan yang loyal dan mengandalkan dukungan dari Rusia, yang merupakan sekutu utamanya (The Moscow Times, 2020).

2. Isolasi Internasional

Belarus mengalami isolasi internasional, dengan banyak negara dan organisasi internasional yang tidak mengakui pemerintahan Lukashenko. Negara-negara Barat melanjutkan tekanan terhadap Lukashenko, meskipun efek jangka panjang dari sanksi dan isolasi ini belum sepenuhnya jelas (Council of the European Union, 2020).

2. Pemilu Myanmar 2020

Diselenggarakan pada tanggal 8 November 2020, dengan tujuan memilih anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat (Pyithu Hluttaw), Dewan Negara Bagian dan Wilayah, serta Dewan Persatuan (Pyidaungsu Hluttaw). Pemilu ini merupakan pemilu kedua sejak pembukaan transisi demokrasi pada tahun 2010, dan bagi banyak orang, ini menjadi ujian penting bagi masa depan demokrasi Myanmar. Partai yang dominan dalam pemilu ini adalah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya telah menang besar dalam pemilu 2015. Hasil dari pemilu 2020 menunjukkan kemenangan besar NLD, yang berhasil memperoleh lebih dari 80% kursi di kedua kamar legislatif (General Election: What You Nws, 2020). Namun, meskipun pemilu berjalan relatif damai dan aman, terdapat sejumlah klaim kecurangan yang muncul, baik dari partai oposisi maupun media internasional. Beberapa pihak, termasuk oposisi utama seperti Partai Solidaritas dan Pembangunan Union (USDP), mengklaim bahwa ada manipulasi dalam proses pemilu, dengan tuduhan bahwa ribuan surat suara dicetak secara ilegal dan bahwa pemilih yang sah tidak dapat memberikan suaranya.

Komisi Pemilu Myanmar (UEC) membantah klaim-klaim tersebut, menyatakan bahwa pemilu 2020 berjalan sesuai dengan prosedur yang transparan dan adil. Mereka menyatakan bahwa meskipun ada masalah teknis, seperti daftar pemilih yang tidak lengkap di beberapa daerah, ini tidak cukup untuk mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Laporan internasional dari berbagai pengamat independen juga menunjukkan bahwa meskipun ada sejumlah masalah administratif, tidak ada bukti yang signifikan mengenai kecurangan terstruktur. Namun, klaim kecurangan ini semakin diperburuk oleh situasi politik di Myanmar yang semakin tegang setelah pemilu. Ketegangan antara NLD dan USDP, yang didukung oleh militer Myanmar (Tatmadaw), semakin memanas. Militer Myanmar, yang telah lama mendominasi politik negara itu meskipun secara formal beralih ke sistem semi-demokratis, menuduh NLD menggunakan pemilu untuk mengonsolidasikan kekuasaan secara tidak sah. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika militer mengancam akan mengambil tindakan jika tuduhan kecurangan tidak diselidiki secara serius (*Al Jazeera*, 2020).

Pada 1 Februari 2021, kurang dari tiga bulan setelah pemilu, militer Myanmar melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Militer menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat tinggi NLD lainnya (*The Irrawaddy*, 2020). Mereka mengklaim bahwa pemilu 2020 tercemar dengan kecurangan yang tidak ditangani dengan

serius oleh pihak berwenang, meskipun tidak ada bukti yang meyakinkan yang mendukung klaim tersebut. Militer juga mendeklarasikan keadaan darurat selama satu tahun dan mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pemilu baru setelah keadaan darurat berakhir. Kudeta ini menyebabkan protes massal di seluruh Myanmar, yang kemudian berujung pada penindasan brutal oleh militer terhadap para pengunjuk rasa dan aktivis pro-demokrasi. Tentara menggunakan kekerasan yang meluas, termasuk tembakan langsung kepada pengunjuk rasa, serta penahanan dan penyiksaan terhadap banyak orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Pemberontakan ini menyebabkan ribuan kematian dan penahanan, serta menciptakan ketegangan sosial dan politik yang lebih besar.

Setelah kudeta, banyak negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar dan pejabat-pejabat yang terlibat dalam kudeta. Namun, beberapa negara tetangga seperti China dan Rusia cenderung mendukung pemerintah militer Myanmar, atau setidaknya tidak mengutuk tindakan mereka secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi internasional gagal dalam mengisolasi junta militer Myanmar secara efektif. Kudeta dan penindasan terhadap oposisi tidak hanya menggagalkan proses demokrasi yang dimulai pada 2010, tetapi juga memperburuk krisis kemanusiaan yang telah lama ada di negara ini (*Myanmar Times*, 2020). Wilayah seperti Rakhine, yang terlibat dalam konflik etnis dan kekerasan terhadap minoritas Rohingya, tetap mengalami ketegangan yang tinggi, dan banyak kelompok etnis yang menentang kekuasaan militer.

Pada saat yang sama, tindakan militer semakin memperburuk keadaan ekonomi Myanmar. Protes, sanksi internasional, dan ketidakstabilan politik menyebabkan penurunan signifikan dalam investasi asing, serta gangguan dalam sistem perbankan dan perdagangan. Hal ini semakin menyulitkan kehidupan warga Myanmar, yang sudah lama hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Kudeta militer Myanmar tahun 2021 telah menggagalkan proses transisi demokrasi yang dimulai pada 2010 dan memunculkan krisis politik yang berkepanjangan. Di luar klaim kecurangan yang tidak terbukti secara substansial, tindakan militer untuk merebut kekuasaan menunjukkan pola sejarah di mana militer Myanmar telah lama menjadi kekuatan dominan dalam politik negara, meskipun ada usaha untuk mengarah ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Hingga saat ini, Myanmar masih dilanda konflik internal yang mendalam, dengan kekerasan yang terus berlanjut dan protes yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

3. Pemilu Ukraina 2019

Terdiri dari dua putaran, yakni Pemilu Presiden yang diadakan pada 31 Maret 2019 dan Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada 21 Juli 2019. Pemilu presiden menjadi sorotan utama karena ketegangan politik yang tinggi pasca-krisis politik dan konflik yang terjadi di wilayah timur Ukraina sejak 2014 (*BBC News*, 2019). Presiden petahana, Petro Poroshenko, yang telah memimpin Ukraina sejak 2014, menghadapi tantangan berat dari berbagai calon, termasuk komedian Volodymyr Zelensky, yang tiba-tiba muncul sebagai sosok baru yang menarik banyak pemilih dengan janji perubahan dan perlawanan terhadap korupsi. Volodymyr Zelensky, meskipun tidak memiliki pengalaman politik formal, berhasil memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Poroshenko dan menjanjikan perubahan besar dalam sistem pemerintahan Ukraina. Ia mencalonkan diri dengan platform antikorupsi dan pembaruan sosial yang menarik bagi kalangan muda dan pemilih yang merasa frustrasi dengan stagnasi ekonomi dan ketegangan politik. Dalam putaran pertama, Zelensky memperoleh lebih dari 30% suara, jauh di atas Poroshenko yang hanya meraih sekitar 16% (*The Guardian*, 2019). Hal ini menunjukkan ketidakpuasan publik yang sangat besar terhadap presiden petahana.

Putaran kedua pemilu presiden berlangsung pada 21 April 2019, dan meskipun Poroshenko berusaha membalikkan keadaan dengan mengkritik ketidakpengalaman Zelensky, hasil akhirnya menunjukkan kemenangan telak bagi Zelensky dengan lebih dari 73% suara (*Foreign Policy*, 2019). Namun, meskipun pemilu tersebut dianggap relatif damai dan tertib, ada sejumlah masalah serius terkait dengan kecurangan dan manipulasi media yang menjadi sorotan dalam proses pemilu 2019 di Ukraina. Salah satu masalah utama dalam pemilu Ukraina 2019 adalah kontrol media. Meskipun Ukraina memiliki kebebasan media yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya, ada dugaan manipulasi media yang menguntungkan kandidat tertentu. Media yang lebih pro-pemerintah, sebagian besar yang memiliki afiliasi dengan oligarki yang mendukung

Poroshenko, seringkali memberikan liputan yang sangat tidak proporsional dan cenderung mendukung Poroshenko (*Reuters*, 2019). Sementara itu, media yang pro-Zelensky, termasuk platform-platform digital dan media sosial, semakin berkembang dan memberikan platform bagi kritik terhadap pemerintah.

Salah satu contoh yang mencolok adalah pengaruh saluran televisi yang dikuasai oleh oligarki. Beberapa saluran utama yang mendukung Poroshenko menampilkan kampanye hitam terhadap Zelensky, sering kali mengaburkan citra kandidat oposisi dengan menyebarkan informasi yang tidak akurat atau memutarbalikkan fakta. Sebaliknya, Zelensky memiliki keuntungan besar dari dukungan media sosial dan platform digital, yang memberinya ruang lebih besar untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, meskipun media sosial juga dipenuhi dengan kampanye politik yang bisa sulit untuk diawasi (*The Diplomat*, 2019). Selain itu, meskipun ada aturan yang mengatur iklan politik selama periode kampanye, ada laporan tentang pembelian suara dan manipulasi melalui iklan politik yang tidak transparan, terutama melalui media sosial. Platform seperti Facebook dan YouTube menjadi arena utama dalam pertarungan politik, dengan sejumlah iklan yang secara halus memengaruhi pemilih, tanpa banyak pengawasan atau aturan yang jelas. Kampanye digital yang dilakukan oleh kedua belah pihak sering kali penuh dengan penyebaran informasi yang menyesatkan dan manipulasi, yang meningkatkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu.

Di samping itu, ada laporan tentang ketidaksetaraan akses ke media bagi kandidat independen dan partai-partai kecil. Sementara kandidat besar seperti Poroshenko dan Zelensky mendapat banyak waktu layar di televisi dan platform lainnya, kandidat dari partai-partai kecil atau independen sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjangkau pemilih mereka. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilu, di mana kandidat dengan sumber daya lebih besar memiliki keuntungan yang jelas dalam kompetisi. Meskipun tidak ada bukti kuat mengenai manipulasi suara yang signifikan dalam pemilu 2019, ada laporan mengenai intimidasi terhadap pemilih dan potensi penyalahgunaan dalam proses pemungutan suara. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah dengan populasi yang lebih pro-Rusia, ada ancaman atau tekanan terhadap warga yang memilih kandidat tertentu, terutama pada pemilu legislatif yang lebih rawan kecurangan. Namun, klaim-klaim ini lebih sulit untuk dibuktikan secara konkret (*Politico*, 2019).

Setelah pemilu presiden selesai, perhatian beralih ke Pemilu Legislatif Ukraina yang diadakan pada 21 Juli 2019. Pemilu legislatif ini menghasilkan kemenangan besar bagi partai Zelensky, yang dikenal dengan nama "Servant of the People" (Pelayan Rakyat), sebuah partai yang didirikan oleh Zelensky sendiri. Partai ini memperoleh lebih dari 40% suara, yang memungkinkan mereka membentuk mayoritas di parlemen Ukraina (*World Politics Review*, 2019). Namun, meskipun kemenangan ini dipandang sebagai kemenangan demokratis, masih ada tuduhan mengenai ketidaksetaraan dalam akses media dan ketidakadilan dalam cara kampanye dijalankan. Secara keseluruhan, meskipun Pemilu Ukraina 2019 diakui secara internasional sebagai pemilu yang lebih bebas dan lebih transparan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, masalah besar tetap ada. Manipulasi media dan ketidaksetaraan dalam akses informasi tetap menjadi masalah utama dalam proses pemilu. Pemilu ini memperlihatkan betapa pentingnya media dalam politik modern, di mana kontrol atas informasi dan narasi bisa menjadi faktor penentu dalam memenangkan pemilu, meskipun hasil akhirnya mencerminkan keinginan rakyat Ukraina untuk perubahan dan reformasi yang lebih mendalam.

Secara keseluruhan, meskipun Pemilu Ukraina 2019 berhasil mengantarkan Zelensky ke tumpuk kekuasaan dengan dukungan rakyat yang besar, masalah-masalah terkait kecurangan, manipulasi media, dan ketidaksetaraan akses tetap menjadi tantangan besar bagi demokrasi Ukraina. Pemilu ini juga mengingatkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam proses pemilu, kontrol media yang kuat dan praktik-praktik politik yang tidak transparan dapat merusak integritas demokrasi, terutama di negara yang sedang berusaha membangun kembali sistem politiknya setelah bertahun-tahun konflik dan ketidakstabilan.

Perbandingan Malpraktek Pemilu terhadap Negara Belarus, Myanmar dan Ukraina

Dalam perbandingan malpraktek yang terjadi pada pemilu di Belarus, Myanmar, dan Ukraina, terdapat beberapa kesamaan dalam hal manipulasi suara, kekerasan terhadap oposisi, serta

ketidaksetaraan akses terhadap media dan informasi. Namun, terdapat juga perbedaan penting dalam cara masing-masing negara menangani masalah tersebut dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Meskipun ketiga negara ini memiliki konteks politik yang sangat berbeda, beberapa tema utama dalam malpraktik pemilu dapat dianalisis.

1. Manipulasi Suara

Di Belarus, manipulasi suara sangat mencolok dalam Pemilu Presiden 2020. Presiden Aleksandr Lukashenko mengklaim kemenangan dengan lebih dari 80% suara, angka yang sangat diragukan mengingat ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahannya. Manipulasi ini termasuk penghitungan suara yang tidak transparan, intimidasi terhadap pemilih, serta pembatasan calon oposisi seperti Svetlana Tikhanovskaya. Pemilu ini juga dilengkapi dengan penutupan tempat pemungutan suara dan penghilangan surat suaranya itu, di Myanmar, meskipun Pemilu 2020 relatif aman dan berjalan dengan sedikit masalah administratif, adanya klaim kecurangan yang diajukan oleh oposisi, terutama terkait pemilih yang terdaftar, dan tuduhan bahwa ribuan surat suara dicetak secara ilegal, sempat memperburuk situasi . Di Ukraina meskipun manipulasi suara tidak terjadi secara luas, ada kekhawatiran terkait penyalahgunaan media dalam mempengaruhi opini publik. Partai-partai besar, seperti yang mendukung Presiden Poroshenko, mengontrol saluran media utama, sehingga informasi yang disebarluaskan sering kali bias, mendukung kandidat tertentu dan merugikan yang lain .

2. Kekerasan terhadap Oposisi

Kekerasan terhadap oposisi terjadi secara ekstrem di Belarus dan Myanmar. Setelah pemilu 2020, protes besar-besaran di Belarus digerakkan oleh ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu yang dianggap curang. Pemerintah Lukashenko merespons dengan keras, menggunakan kekuatan militer dan pasukan keamanan untuk membubarkan demonstrasi dengan kekerasan, yang mengakibatkan ribuan orang ditangkap dan dilaporkan mengalami penyiksaan . Hal yang serupa terjadi ana setelah pemilu 2020, ketegangan meningkat antara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memenangkan pemilu dan militer Myanmar. Klaim kecurangan oleh militer memuncak dengan kudeta pada Februari 2021, yang disertai dengan penindasan brutal terhadap protes dan oposisi, yang menyebabkan ribuan kematian . Di sisi lain, meskipun ada ketegangan politik besar di Ukraina, kekerasan terhadap oposisi tidak sebesar yang terjadi di Belarus dan Myanmar. Namun, di Ukraina terdapat manipulasi melalui media yang sangat mempengaruhi opini publik, terutama di wilayah yang lebih pro-Rusia .

3. Manipulasi Media dan Ketidaksetaraan Akses

Media sangat berperan penting dalam ketiga negara ini, meskipun dengan cara yang berbeda. Di Belarus, kontrol media berada di tangan pemerintah, dan pengawasan internasional terhadap pemilu sangat dibatasi, sehingga warga Belarus tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang objektif. Pemerintah melakukan penghalangan terhadap media oposisi dan hanya memberikan ruang bagi media yang mendukung rezim . Di Myanmar, meskipun situasi media lebih terbuka, ada kecempetahan untuk mengendalikan narasi yang ada, terutama setelah kudeta. Pemilu 2020 sempat memunculkan klaim adanya ketidakseimbangan akses terhadap media bagi calon oposisi . Sementara itu, di Ukraina, meskipun kebebasan media lebih besar, keanekaragaman media menjadi masalah utama, dengan oligarki yang mengendalikan saluran media besar dan memberi keuntungan bagi kandidat tertentu. Manipulasi ini lebih terlihat dalam bentuk penyebarluasan informasi yang tidak akurat atau merugikan kandidat oposisi.

4. Respon Internasional dan Isolasi

Setiap negara merespon tekanan internasional yang berbeda. Belarus menghadapi sanksi internasional setelah pemilu 2020, dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat menargetkan pejabat-pejabat tinggi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan manipulasi pemilu. Namun, pemerintah Lukashenko tetap bertahan, terutama dengan dukungan dari Rusia . Di Myanmar, setelah kudeta militer, negara-negara Barat seperti AS dan Uni Eropa menjalani terhadap militer Myanmar. Namun, Rusia dan China tetap mendukung junta militer atau setidaknya tidak mengutuk mereka secara terbuka . Sementara itu, di Ukraina, meskipun ada beberapa masalah terkait manipulasi media dan ketidakseimbangan, secara umum pemilu 2019 dianggap sebagai langkah maju menuju demokrasi, meskipun ada kekhawatiran bahwa kontrol media masih menghambat integritas pemilu .

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pemilu di Belarus, Myanmar, dan Ukraina pada tahun 2020 dan 2019 menunjukkan berbagai tantangan dalam praktik demokrasi, dengan beberapa kesamaan dan perbedaan penting. Di Belarus, pemilu 2020 penuh dengan manipulasi suara, termasuk penghitungan yang tidak transparan, intimidasi terhadap pemilih, dan penghilangan surat suara, yang memicu protes besar-besaran yang kemudian dibubarkan dengan kekerasan oleh pemerintah. Kekerasan serupa juga terjadi di Myanmar setelah pemilu 2020, di mana militer menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Aung San Suu Kyi dalam kudeta setelah klaim kecurangan yang tidak terbukti. Di Ukraina, meskipun pemilu 2019 relatif damai, masalah utama terletak pada manipulasi media, di mana saluran media pro-pemerintah mendukung kandidat tertentu dan merugikan yang lain, sementara akses media untuk calon independen tidak setara. Ketiga negara ini juga menunjukkan pentingnya media dalam mempengaruhi opini publik, dengan Belarus mengontrol media secara ketat, Myanmar yang cenderung mengendalikan narasi setelah kudeta, dan Ukraina di mana oligarki menguasai media besar. Respons internasional terhadap ketiga negara ini juga berbeda, dengan Belarus dan Myanmar mendapat kecaman luas, sanksi, dan isolasi internasional, sementara Ukraina meskipun mendapat kritik terhadap manipulasi media, tetap diakui sebagai negara yang lebih bebas dalam hal proses pemilu. Meskipun masing-masing negara menghadapi tantangan yang berbeda dalam memastikan integritas pemilu dan kebebasan media, permasalahan terkait manipulasi suara, kekerasan terhadap oposisi, serta ketidaksetaraan akses terhadap informasi dan media tetap menjadi isu besar yang memengaruhi kualitas demokrasi di ketiga negara tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2020). *Belarus: Crackdown on Protests and Human Rights Violations*. Diakses dari <https://amnesty.org>
- BBC News. (2019). *Nigeria 2019 Election Results: Buhari Declared Winner Amid Disputes*. Diakses dari <https://bbc.com>
- BBC News. (2020). *Belarus Protests: More Than 7,000 Detained Amid Crackdown*. Diakses dari <https://bbc.com>
- Committee to Protect Journalists. (2020). *Belarus: Journalists Detained During Protests*. Diakses dari <https://cpj.org>
- Council of the European Union. (2020). *EU Position on Belarus Elections*. Diakses dari <https://europa.eu>
- CNN Indonesia. (2019, 31 Maret). *Pemilu Ukraina 2019: Kejutan dari Volodymyr Zelensky*. CNN Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/pemilu-ukraina-2019>
- Detik News. (2019, 27 Maret). *Media Ukraina: Terpolarisasi dan Pengaruhnya dalam Pemilu 2019*. Detik.com. Diakses dari <https://www.detik.com/media-ukraina-2019>
- European Union. (2019). *EU Election Observation Mission: Nigeria 2019 Presidential and Legislative Elections*. Diakses dari <https://europa.eu>
- European Union Election Observation Mission (EU EOM). (2019). *Final Report on the 2019 Presidential and Parliamentary Elections in Ukraine*.
- Freedom House. (2019). *Freedom in the World 2019: Ukraine*. Diakses dari <https://freedomhouse.org>
- Freedom House. (2020). *Freedom in the World 2020: Belarus*. Diakses dari <https://freedomhouse.org>
- Freedom House. (2020). *Kebebasan Media dalam Pemilu: Kasus Rusia dan Indonesia*. Diakses dari <https://www.freedomhouse.org/pemilu-rusia-indonesia>
- Human Rights Watch. (2019). *Pemalsuan dan Manipulasi Suara di Negara-Otoriter*. Diakses dari <https://www.hrw.org/pemilu-manipulasi>
- Human Rights Watch. (2019). *Nigeria: 2019 Elections Marred by Violence, Manipulation*. Diakses dari <https://hrw.org>
- Independent National Electoral Commission (INEC). (2019). *Report on the 2019 Nigerian General Election*. Diakses dari <https://inecnigeria.org>

- International Crisis Group. (2019). *Ukraine's Political Transition After the 2019 Elections: The Challenges Ahead.*
- Kompas. (2020, 15 Agustus). *Pemilu Belarus: Tuduhan Kecurangan dan Manipulasi.* Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/pemilu-belarus-2020>
- OSCE. (2020). *Final Report on the 2020 Presidential Elections in Belarus.* Diakses dari <https://osce.org>
- Republika. (2021, 9 November). *Pemilu Myanmar 2020: Manipulasi dan Tuduhan Kecurangan.* Republika.co.id. Diakses dari <https://www.republika.co.id/pemilu-myanmar-2020>
- Reuters. (2019). *Ukraine's 2019 Election Campaign Marked by Social Media Influence.* Diakses dari <https://reuters.com>
- Reuters. (2020). *Belarus Protests Against Lukashenko's Election Victory.* Diakses dari <https://reuters.com>
- Tempo. (2020, 14 Agustus). *Pemilu Belarus 2020: Manipulasi Suara dan Ketidakadilan.* Tempo.co. Diakses dari <https://www.tempo.co/pemilu-belarus-2020>
- The Carter Center. (2018). *Tantangan Keamanan dalam Pemilu di Wilayah Konflik.* The Carter Center. Diakses dari <https://www.cartercenter.org/pemilu-keamanan>
- The Guardian. (2017). *Pengaruh Serangan Siber dalam Pemilu AS 2016.* The Guardian. Diakses dari <https://www.theguardian.com/pemilu-as-2016>
- The Guardian. (2019). *Nigeria Election: Buhari Wins Amid Controversy and Violence.* Diakses dari <https://theguardian.com>
- The Guardian. (2020). *Svetlana Tikhanovskaya: The Belarusian Opposition Leader Who Took on Lukashenko.* Diakses dari <https://theguardian.com>
- The Jakarta Post. (2020, 23 November). *Klaim Kecurangan Pemilu Myanmar 2020: Masalah Legitimasi.* The Jakarta Post. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/pemilu-myanmar-2020>
- The Moscow Times. (2020). *Belarus: A Crisis in the Making.* Diakses dari <https://themoscowtimes.com>
- Transparency International. (2021). *Pemilu Myanmar: Ketidakadilan dan Intimidasi Terhadap Oposisi.* Transparency.org. Diakses dari <https://www.transparency.org/pemilu-myanmar-2020>
- Transparency International. (2022). *Reformasi Pemilu: Memastikan Pemilu yang Transparan dan Akuntabel.* Transparency.org. Diakses dari <https://www.transparency.org/reformasi-pemilu>
- United Nations. (2020). *Pemilu di Negara-Konflik: Masalah Keamanan dan Pembatasan Hak Suara.* United Nations. Diakses dari <https://www.un.org/pemilu-keamanan>